PARTISIPASI POLITIK DALAM TATANAN POLITIK BARU : STUDI TENTANG PARTISIPASI POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI SULAWESI SELATAN

AHYAR ANWAR *

ABSTRACT

This research is aimed to know a criterion phenomenon between social groups and the level of social class in participating the political party in South Sulawesi. The research used descriptive method and the collection of data was done through observation, interview and documentation, as well as distribution frequency and percentage analysis. The results of this research show that the political participation in South Sulawesi has correlation with identification of social group in local community, particularly to the ethnic and religion. The community from a certain ethnic who is motivated to take participation in political party in South Sulawesi is rationally based on the particular values they possess.

PENDAHULUAN

Perubahan tatanan politik di Indonesia yang secara legalitas hukum tertuang dalam ketetapan MPR RI No. XIV/MPR/ 1998 tentang pemilihan umum, yang didalamnya terkandung dua aspek fundamental terhadap perubahan tatanan politik di Indonesia yaitu adanya kebebasan mendirikan partai politik dan upaya memaksimalkan potensi demokrasi yang mungkin dilakukan.

Sulawesi Selatan yang menurut data BPS 1997 tercatat berpenduduk sebanyak 7.707.654 jiwa, yang terbagi kedalam 4 kelompok sosial etnik lokal yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, serta 4 kelompok sosial agama utama yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Buddha. Bila dikaitkan dengan perubahan tatanan politik

* Lahir di Makassar 15 Februari 1970, sarjana filsafat dari Univ. Gajah Mada (1995) dan Magister Sains dalam bidang Sosiologi di Univ. Hasaanuddin (1999). Staf Pengajar Universitas Negeri Makassar.

Indonesia dengan sistem politik multi partai yang memungkinkan partisipasi politik dalam segala lapisan kelas dan kelompok-kelompok sosial dalam partai politik di Sulawesi Selatan, serta terbukanya saluran partisipasi politik secara luas terutama dalam pembentukan partai-partai politik, adalah aspek utama yang menjadi faktor determinan timbulnya partisipasi politik dalam bentuk keterlibatan individu dalam kepengurusan suatu partai politik.

Fokus penelitian ini ingin mengetahui fenomena keterkaitan antara kelompok sosial dan tingkat kelas sosial dalam partisipasi politik pada partai politik. Bila suatu kelompok sosial dan tingkatan kelas sosial tertentu sebagai suatu latarbelakang sosial yang melekat pada suatu individu mempunyai hubungan yang erat dengan peran partisipasi politik individu tersebut dalam partai politik, maka masyarakat Sulawesi Selatan akan berpartisipasi politik dalam pembentukan dan kepengurusan parpol berdasarkan identifikasi kekuatan kelompok sosial dan status tingkatan kelas sosialnya.

Pada sisi lain timbulnya partisipasi politik masyarakat Sulawesi Selatan dalam perubahan tatanan politik Indonesia terkait dengan keberadaan kelompok dan asosiasi sosial setempat. Penelitian ini sekaligus ingin memperoleh gambaran tentang distribusi kelompok sosial pada partai politik, motivasi individu dalam berpartisipasi politik pada partai politik, peran asosiasi sosial terhadap pembentukan partai politik serta aliran pemikiran politik yang berkembang dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif tentang partisipasi politik berupa keterlibatan individu pada partai-partai politik. Kesatuan sosial atau agregat sosial dalam penelitian ini adalah komunitas masyarakat yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai warga masyarakat di propinsi Sulawesi-Selatan, sedangkan unit sosial yang diangkat sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat pada suatu partai politik di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini, fokus realitas sosial yang dianalisis adalah keterlibatan individu dalam kepengurusan suatu partai politik dan partisipasi politik dalam pembentukan partai politik menjelang dilaksanakannya pemilihan umum 1999, yang dilokuskan pada peran strata sosial individu serta kelompok sosial yaitu agama dan etnik yang menjadi latar belakang individu. Penelitian ini juga akan menganalisis motivasi individu yang berpartisipasi pada partai politik melalui pemahaman interpretatif (*interpretatif understanding*).

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Desember 1998 sampai dengan akhir bulan Februari 1999. Populasi penelitian ini adalah seluruh partai politik yang memiliki Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD) di propinsi Sulawesi Selatan, sementara sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua tahapan dengan pengambilan

secara purposif. Tahap pertama diambil sampel secara purposif sebanyak sepuluh partai, yaitu : 1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5. Partai Keadilan (PK) 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Golongan Karya (GOLKAR) 8. Partai Kebangkitan Umat (PKU) 9. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) 10. Partai Kedaulatan Rakyat (PILAR), dan yang dijadikan unit analisis adalah pengurus partai. selanjutnya dipilih secara purposif 10 responden yang masing-masing satu orang pengurus inti (dalam konteks ini adalah ketua umum, ketua dan sekretaris) untuk dijadikan sampel dalam memahami motivasi keterlibatan individu dalam suatu partai politik.

Selanjutnya pada tahap kedua, dipilih 4 partai politik yang berbasis pada satu asosiasi sosial, secara purposif dipilih partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdatul Umat (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) yang berasal dari asosiasi sosial Nahdlatul Ulama (NU). Untuk dijadikan sebagai sumber informasi penelitian atas peranan asosiasi sosial dalam pembentukan partai politik maupun perkembangan aliran pemikiran politik yang terdapat didalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Berdasarkan masalah yang diteliti dan jenis data yang ingin diperoleh, maka dalam penelitian ini akan digunakan sejumlah kombinasi metode dan teknik pengumpulan data Observasi, Interview dan Dokumentasi. diri (*performance*). Selanjutnya guna menghindari pemahaman-interpretasi yang bersifat subjektif berdasarkan validitas subjektif peneliti maka dilakukan konfirmasi pada dua orang *key informan* yang memahami persoalan partisipasi politik dalam suatu partai politik, juga pernah terlibat secara aktif pada suatu partai politik pada era Orde Baru di Sulawesi Selatan.

Proses teknik analisis data berlangsung dalam beberapa tahapan. Pertama, melakukan

observasi dan inventarisasi struktur kepengurusan partai politik yang dijadikan sampel. Selanjutnya dilakukan pembagian informasi data yang diperoleh menjadi tiga kelompok data yaitu :

1. Data kuantitatif yang bersifat sekunder, ditujukan secara khusus untuk melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis persentase.
2. Data kuantitatif sekunder yang ditujukan secara umum untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pendukung analisis deskriptif kualitatif.
3. Data kuantitatif yang bersifat sekunder, yang ditujukan sebagai bahan pelengkap untuk memperkaya analisis deskriptif dari data kualitatif primer.

Selanjutnya data kuantitatif yang bersifat sekunder dilakukan prosedur teknik analisis sebagai berikut:

1. Analisis hubungan antara variabel, sesuai dengan rencana penelitian dengan menggunakan tabel silang, distribusi frekuensi dan analisis persentase.
2. Dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian dengan mengembangkan interpretasi sosiologis terhadap data-data kuantitatif yang telah diperoleh sebelumnya.

Pada tahapan kedua, adalah melakukan observasi dan wawancara mendalam baik sifatnya terstruktur maupun bebas. Unit analisis yang digunakan pada tahapan ini adalah 10 orang sampel yang masing-masing adalah pengurus eksekutif partai politik dari 10 partai politik yang dijadikan sampel sebelumnya. Pengurus partai secara khusus dipilih yang memiliki jabatan kepengurusan sebagai ketua, wakil ketua ataupun sekretaris umum. Analisis terhadap informasi data yang diperoleh diinterpretasi secara fungsional dengan tujuan memperoleh pemahaman motivasi individual berpartisipasi secara politik dalam konteks aktif terlibat sebagai pengurus partai politik. Upaya analisis ini ditujukan secara khusus memahami dunia makna responden berdasarkan eksplisitas tindakan dan

sikapnya berpartisipasi politik sebagai pengurus partai politik.

Pada tahap ketiga dilakukan wawancara secara mendalam pada 4 orang sampel dari pengurus partai politik dengan basis aliran Nahdatul Ulama (NU). Basis aliran NU dijadikan sebagai sebuah unit analisis guna memahami fenomena partisipasi politik pembentukan suatu partai politik yang berasal dari asosiasi sosial yang sama dan isu politik yang juga sama. Analisis yang dilakukan adalah bersifat interpretatif logis dan diperdalam dengan penafsiran yang memanfaatkan hasil-hasil penelitian lain yang sangat berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan.

Secara umum hasil analisis pada tahap kedua dan ketiga diinterpretasi secara logis dan fungsional dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penjelasan deskriptif dari data yang diperoleh dengan membatasi pada fenomena-fenomena sosial yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Interpretasi terhadap hasil analisis deskriptif dengan menghubungkan secara fungsional dengan fenomena-fenomena sosiologis-politik yang aktual pada saat penelitian berlangsung.
3. Interpretasi terhadap hasil analisis deskriptif dikaitkan secara logis dengan data-data statistik maupun data hasil penelitian sebelumnya dengan dibatasi pada fenomena yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Politik Kelompok Sosial Etnik

Kelompok etnik Yang berpartisipasi politik pada partai politik dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu etnik asli Sulawesi Selatan yang terdiri dari etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, kemudian juga dapat diidentifikasi etnik keturunan Tionghoa dan etnik asli Indonesia yang berasal dari luar propinsi Sulawesi Selatan. secara keseluruhan etnik

Bugis yang terlibat sebagai pengurus partai politik, baik eksekutif maupun legislatif mencapai 59,8 persen, etnik Makassar sebesar 17,4 persen, dan etnik Indonesia yang berasal dari luar Sul-Sel dan menetap di Sulawesi Selatan pada kepengurusan partai politik mencapai 10,6 persen. Sementara untuk etnik Toraja dan Mandar masing-masing hanya sebesar 4,1 persen dan 4,9 persen.

Di Sulawesi Selatan saluran mobilitas merupakan jalan menuju partisipasi politik dalam organisasi politik. Konteks tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan daripada berkaitan dengan jumlah populasi suatu etnik. Hasil penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang mendasar antara kelompok etnik dengan partisipasi individual dari etnik tersebut pada kepengurusan suatu partai politik.

Sementara berdasarkan data hasil penelitian pada tabel 1 menggambarkan adanya keterkaitan yang mendasar antara jabatan yang dimiliki oleh seseorang dalam kepengurusan eksekutif dengan kelompok etnik yang melekat pada individu pengurus partai politik tersebut. Sehingga secara umum pula dapat disimpulkan bahwa jabatan ketua umum dalam kepengurusan eksekutif suatu partai politik sangat berkaitan dengan populasi terbesar kelompok etnik yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jabatan ketua atau wakil ketua menggambarkan fleksibilitas distribusi pada kelompok etnik. Jabatan sekretaris dan bendahara dalam kepengurusan eksekutif partai politik seperti juga dengan ketua umum, dianggap memiliki akses politik dalam identifikasi etnik guna penggalangan massa

Tabel 1. Distribusi Kelompok etnik dalam jabatan kepengurusan partai politik pada sepuluh partai politik di Sulawesi-Selatan tahun 1999.
(Sumber :Penelitian lapangan Des 1998 - Jan 1999).

Jenis Jabatan Pengu-rus Partai	Kelompok Etnik						Jumlah total
	Bugis	Makassar	Mandar	Toraja	Tionghoa	Luar Sul-Sel	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketua Umum	8	1	-	1	-	-	10
Ketua/ Wakil Ketua	51	11	4	4	2	17	89
Sekretaris Umum	6	1	-	2	-	1	10
Wkl. Sek.	27	18	2	1	1	7	56
Bendahara Umum	9	-	-	-	-	1	10
Wkl. Bend.	11	8	2	1	5	1	28
Jumlah	112	39	8	9	8	27	203

(Data Sekunder)

2. Partisipasi Politik Kelompok Sosial Agama

Terdapat kecenderungan minimnya partisipasi politik dalam bentuk mobilitas

individu yang melibatkan diri dalam kepengurusan partai politik pada kelompok agama non-Islam. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat eksplosivitas yang tinggi secara sosial,

bila kelompok agama berbenturan dalam aspek politik. Keberadaan kelompok agama khususnya Kristen di Sulawesi Selatan identik dengan kelompok etnik Toraja, sementara posisi sosial etnik Toraja maupun agama Kristen di Sul-Sel dalam aspek jumlah penduduk sangat marginal.

Keterlibatan yang sangat minim dari kelompok non-Islam secara khusus juga tampak pada partai yang berasas pluralis, hanya sebesar 11,0 persen dari keseluruhan jumlah mobilitas individu yang berpartisipasi politik. Pada masyarakat Sulawesi Selatan, kelompok agama yang minoritas cenderung untuk tidak mengambil tindakan partisipasi politik dengan melakukan organisasi kolektif berdasarkan segregasi agama, dan lebih memilih berpartisipasi pada tindakan ekonomi

dan kependidikan ataupun tindakan politik pemberian suara pada pemilu.

Distribusi kelompok sosial agama dalam kepengurusan eksekutif partai politik di Sulawesi Selatan sangat berkoherensi dengan besarnya proporsi kelompok agama yang terdapat di Sulawesi Selatan. Pada Tabel 2 tampak dominasi kelompok sosial agama Islam dalam kepengurusan partai politik mencapai 82,7 persen dari keseluruhan 203 yang tercatat berpartisipasi dalam partai politik. Sedangkan kelompok sosial agama Kristen baik Protestan maupun Katholik hanya mencapai 16,7 persen dan 23 orang di antaranya merupakan pengurus pada partai dengan identitas kelompok Kristen, atau mencapai 67,6 persen dari seluruh jumlah individu yang berpartisipasi dalam partai politik.

Tabel 2. Distribusi kelompok agama dalam jabatan kepengurusan eksekutif partai politik pada sepuluh partai politik di Sulawesi Selatan tahun 1999.
(Sumber: penelitian lapangan Des 1998- Jan 1999).

Jenis Jabatan Pengu- rus Partai	Kelompok Agama			Jumlah total
	Islam	Kristen	Budha	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketua Umum	9	1	-	10
Ketua/ Wakil Ketua	71	18	-	89
Sekretaris				
Umum	9	1	-	10
Wkl. Sek	49	7	-	56
Bendahara				
Umum	9	1	-	10
Wkl. Bend	21	6	1	28
Jumlah	168	34	1	203

(Data Sekunder)

3. Peranan kelompok elit pada kepengurusan partai politik

Di Sulawesi Selatan terdapat peranan yang besar dari kelas elit yang berpartisipasi dalam partai politik. Pimpinan eksekutif dari partai politik secara keseluruhan merupakan

golongan kelas elit. Hal ini sangat berkaitan dengan asumsi bahwa kelas elit merupakan kelas penentu yang memiliki kemampuan tertentu dalam melakukan penggalangan massa untuk menjadi pendukung suatu partai politik. Selain itu faktor jarak waktu yang sangat

sempit antara persiapan pendirian suatu partai politik dengan pemilihan umum yang direncanakan pada bulan Juni 1999, menimbulkan problema fungsional dalam konstalasi politik dan sosial dimana partai politik kemudian diupayakan menjadi sebuah subsistem yang harus diterima oleh masyarakat sebagai sebuah eksistensi baru. Pada sisi lain partai politik berupaya untuk masuk secara fungsional ke dalam sistem-sistem sosial masyarakat, agar dapat tersosialisasi dan mampu meraih dukungan sosial sebanyak mungkin. Kondisi tersebut mengangkat peran kaum elit untuk terlibat secara dominan berpartisipasi pada partai-partai politik.

Para individu elit yang terlibat dalam partai politik di Sulawesi Selatan berasal dari elit eksternal yaitu elit politik (eks-birokrat) dan elit ilmiah, dan elit agama serta elit keturunan bangsawanan untuk elit internal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, nilai sosial atau asal-usul sosial dan ciri-ciri kepribadian sangat dominan dalam kepemimpinan partai eksekutif di Sulawesi Selatan. Terdapat determinasi kekuasaan yang sangat besar tidak sekedar secara sosial bahkan secara politis dari individu-individu yang memiliki nilai sosial yang berpartisipasi dalam partai politik dibandingkan dengan individu-individu yang memiliki kekuasaan pada pranata-pranata politik, ekonomi, dan militer. Faktor perubahan iklim politik membawa dampak determinan yang sangat besar terhadap perubahan persepsi politik masyarakat

terutama berkaitan dengan kekuasaan yang terdapat dalam pranata-pranata politik.

4. Motivasi berpartisipasi elit dalam partai politik

Terdapat hanya 30 persen individu elit yang berpartisipasi politik pada partai politik bermotivasi non-rasional afektif. sedangkan 70 persen bermotivasi rasional, dengan perincian 60 persen berdasarkan motivasi rasional bernilai dan hanya 10 persen dengan motivasi rasional bertujuan. Motivasi berpartisipasi para individu elit dalam partai politik di Sulawesi Selatan sebagian besar atas dasar rasional yang bertendensi dengan nilai-nilai tertentu yang dianggap absolut dan sangat berkaitan dengan adanya komitmen subjektif dimana tujuan berpartisipasi dalam politik sudah tercakup di dalam komitmen tentang nilai yang dianggap sebagai sebuah tindakan yang telah diperhitungkan dan pertimbangan yang dilandasi oleh suatu kesadaran pikir. Pada tabel 3 menggambarkan bahwa para individu berpartisipasi politik dalam partai politik berkisar pada pengabdian dan perjuangan tentang nilai-nilai yang dirasionalkan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan seperti besar kecilnya suatu partai, respon masyarakat, peluang memenangkan pemilu ataupun potensi-potensi politik yang mungkin dapat diperoleh sebagai suatu konsekuensi keaktifan, sama sekali tidak relevan dengan motivasi dalam berpartisipasi.

Tabel 3. Motivasi pimpinan eksekutif yang terlibat sebagai Pengurus partai politik pada sepuluh partai politik di Sulawesi- Selatan dalam persentase.
(Sumber : Penelitian lapangan Des 1998- Jan 1999).

Kategori Tujuan berpartisipasi	Karakter Motivasi	Jumlah (N)	persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Menyalurkan aspirasi	Non rasional afektif	3	30
Pengabdian kepada umat	Rasional bernilai	3	30
Memperjuangkan cita-cita kelompok	Rasional bernilai	3	30
Kepentingan individual	Rasional bertujuan	1	10
Jumlah Total		10	100

(Data Primer)

5. Konflik kepentingan elit dalam asosiasi sosial

Terbentuknya 4 partai politik dengan basis asosiasi sosial yang sama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Ummat (PKU), Partai Nahdlatul Ummah (PNU), dan Partai SUN, merupakan fenomena adanya pluralitas kepentingan elit dalam suatu asosiasi sosial yang secara ideologis tidak dapat ditampung dalam satu partai saja.

Keempat partai politik yang terbentuk dari asosiasi sosial NU secara substansial bukanlah mewakili empat isu politik yang terdapat dalam asosiasi sosial NU dan diangkat sebagai suatu ekspresi politik. Analisis yang dilakukan menampakkan pertama adanya kepentingan kelompok elit yang berkaitan dengan konteks wawasan ideologis ke-Islaman, kedua terdapat konflik politik antarelit yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik.

Kepentingan kelompok elit dalam asosiasi sosial NU juga mengimplisitkan adanya perbedaan ideologis ke-Islaman yang diakomodir dalam jalur pembentukan partai politik sebagai sebuah ketegasan akan adanya perbedaan ideologis dalam memahami politik. Konteks tersebut menggambarkan adanya

pluralitas ideologi pada suatu komunitas asosiasi sosial. PKB mencetuskan diri sebagai perwakilan kelompok intelektual muda yang melakukan pemberontakan terhadap golongan "orang-orang tua" yang ada dalam asosiasi sosial NU. Sementara PKU dan PNU mengidentifikasi diri sebagai komponen politik yang lurus dengan perjuangan khittah NU. Partai SUNI sendiri lebih mencerminkan diri sebagai partai yang mengakomodir Islam nasionalis dalam NU.

Pengaruh yang fundamental dari konflik antar elit pada organisasi asosiasi sosial Islam tradisional di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama pada tingkat pusat juga sebagai suatu faktor yang menggambarkan terjadi perembesan konflik elit sampai pada tingkat wilayah khususnya Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut didukung oleh fakta dukungan dan antusiasme kelompok elit NU di Sulawesi Selatan untuk mengambil posisi politik pada empat partai yang terbentuk dari asosiasi sosial Islam tradisional NU. Keterlibatan para elit NU pada empat partai politik yang berbeda pada aspek lain mencerminkan sebagai suatu pola penampungan kepentingan-kepentingan politik yang terdiferensiasi secara ideologis

sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam perspektif konflik kepentingan tetapi memiliki dampak yang sistemik fungsional bagi asosiasi sosial Islam tradisional pada umumnya serta NU pada khususnya, di mana semua elit dengan kepentingan politik yang berbeda masing-masing memperoleh wadah partisipasi politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- (a). Kelompok sosial berupa etnik dan agama masih memiliki relevansi hubungan logis terhadap partisipasi politik masyarakat di Sulawesi Selatan. Besarnya jumlah kuantitas populasi suatu etnik maupun kelompok agama berhubungan dengan jumlah distribusi individu etnik dan penganut agama tersebut pada suatu partai politik. keberadaan elit eksekutif sebagai tokoh pimpinan pada suatu partai politik berkaitan dengan identifikasi besar kelompok etnik dan agama yang terdapat pada populasi masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga terdapat keterkaitan antara identifikasi diri secara kelompok suatu individu dengan partisipasi politiknya pada partai politik.
- (b). Masyarakat Sulawesi Selatan yang berpartisipasi politik pada tingkatan individual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang dipahami secara subjektif dan terkait dengan identitas kelompok agama yang dianut serta perspektif politik yang menjadi landasan motivasi dalam berpartisipasi politik dengan terlibat sebagai pengurus suatu partai politik.
- (c). Masyarakat Sulawesi Selatan pada dataran kolektif berpartisipasi politik terkait dengan identifikasi asosiasi sosial yang mewakili suatu aliran pemikiran politik tertentu. Secara intern dalam suatu asosiasi sosial terdapat konflik pada dataran elit yang berkaitan dengan

kepentingan-kepentingan politik secara implisit sangat bertendensi ideologis. Konflik elit pada asosiasi sosial tersebut termanifestasi melalui partisipasi elit dari asosiasi-asosiasi sosial pada partai-partai politik yang berbeda.

2. Saran

- (a) Perlunya sosialisasi politik mengenai saling menghargai perbedaan secara politik, terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional, guna menghindari konflik kelompok yang dapat mengarah pada implikasi disintegrasi.
- (b) Perlunya dibentuk semacam forum komunikasi antar partai yang menonjolkan jalur musyawarah dan kebersamaan, sekaligus sebagai ajang pematangan politik.
- (c). Pentingnya memaksimalkan peran cendekiawan agama dan tokoh adat tradisional untuk menanamkan pemahaman politik, sementara untuk jangka panjang dapat ditempuh jalur kurikulum pendidikan menengah atas untuk memasukkan pendidikan politik dalam rangka membina keterbukaan ideologis generasi muda, sebagai upaya mengantisipasi perjalanan bangsa dan negara kedepan yang sangat diwarnai oleh pluralitas sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Alford, Robert dan Roger Friedland. 1975. *“Political Participation”*. Annual Review of Sociology Volume I. Palo Alto : Annual Review, Inc.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture : Public Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton : Princeton University Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. terjemahan YIIS. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Huntington, P Samuel dan John Nelson. 94. *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*. Diterjemahkan

- Oleh Sahat Simamora : Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta : PT Rhineka Cipta.
- Liddle, R. William. 1992. ***Partisipasi dan Partai Politik : Indonesia pada Awal Orde Baru***. Jakarta: Grafiti Press.
- Orum, M. Anthony. 1966. "*A Reappraisal of the Social and Participation of Negroes*". American Journal of Sociology, Volume 72.
- Verba, Sidney dan Norman H. Nie. 1972. ***Participation in America : Political Democracy and Social Equality***. New York : Harper and Row Publisher.